

# Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar

Author:

Kadek Prawira Wahyudi<sup>1</sup>, Marja Sinurat<sup>2</sup>, Arina Romarina<sup>3</sup>, Ayu Widowati Johannes<sup>4</sup>

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri <sup>1,2,3,4</sup>,

Jl. Raya soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Email:

[prawirawahyudi23@gmail.com](mailto:prawirawahyudi23@gmail.com)<sup>1</sup>, [marjasinurat@ipdn.ac.id](mailto:marjasinurat@ipdn.ac.id)<sup>2</sup>, [arina\\_romarina@ipdn.ac.id](mailto:arina_romarina@ipdn.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ayuwidowati@ipdn.ac.id](mailto:ayuwidowati@ipdn.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRACT

*Optimizing the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) is very important to improve the quality of regional financial reports. By utilizing the right information technology, local governments can manage financial data more effectively and efficiently. SIPD allows the integration of various financial data spread across various work units, making it easier to supervise and control. This research aims to determine the optimization of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in improving the quality of regional government financial reports in increasing the use of SIPD so that it can improve the quality of regional government financial reporting in Gianyar Regency. The phenomenon of system errors that occur in Gianyar Regency, such as data from other districts that are included in the direct payment order report in Gianyar Regency, affects the quality of the financial report itself. The aim of this research is to optimize SIPD in Gianyar Regency with the research design being qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques use three methods, namely observation, interviews and documentation. The data that has been collected is analyzed according to the Miles and Huberman analysis model, which includes data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The theoretical basis that researchers use in this research is to use the theory according to DeLone and McLean with six key elements. System quality, information quality, service quality, intensity of use, user satisfaction and net benefits. Based on the discussion, it can be seen how the implementation of SIPD in Gianyar Regency has not run optimally and can be said to be optimal, which is influenced by internal and external factors.*

**Keywords:** *Information System, Report Quality, Regional Government Financial Reports*

## ABSTRAK

Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan secara lebih efektif dan efisien. SIPD memungkinkan integrasi berbagai data keuangan yang tersebar di berbagai unit kerja, sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan SIPD sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar. Fenomena kesalahan sistem yang terjadi di Kabupaten Gianyar seperti data kabupaten lain yang masuk pada laporan surat perintah membayar langsung di Kabupaten Gianyar mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan SIPD di Kabupaten Gianyar dengan desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis sesuai model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori menurut DeLone dan McLean dengan enam elemen kunci. Kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*). Berdasarkan pada pembahasan maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan SIPD di Kabupaten Gianyar belum berjalan maksimal dan dapat dikatakan optimal yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, Kualitas Laporan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

Menurut Nurdin (2017:9) Pemerintah adalah entitas atau organisasi yang memegang kekuasaan untuk merumuskan dan menjalankan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerahnya harus berdasar pada regulasi yang berlaku agar menciptakan penyelenggaraan yang berjalan tertib, disiplin, akuntabel, efektif, dan terbuka dengan berdasarkan pada asas keadilan, kebermanfaatan, kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Simangunsong (2016:63) pemerintah daerah adalah alat dalam system pemerintahan nasional yang mana pemerintah daerah melihat pada otoritas administrasi di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang baik dapat dilihat dari hasil laporan keuangannya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mendapatkan predikat opini. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah bersama dengan UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada kedua perundangan ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut (Nooraini, A., Mamulak, C., & Sinurat, 2022) bahwa laporan

keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi pemerintahan. Anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu dipertanggungjawabkan agar laporan keuangan mengacu kepada standar pengelolaan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Menurut (Halim & Muhammad, 2012) bahwa proses pengelolaan keuangan daerah ialah segala aktivitas keuangan dengan didalamnya mencakup pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, perencanaan, pengawasan, dan termasuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Kewenangan mengatur tata kelola keuangan daerah merupakan kewenangan pemerintah yang meliuti segala kegiatan pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, penatausahaan, perencanaan, maupun pelaksanaan yang dilaksanakan secara transparan juga sistematis kemudian tercapai hasil (*output*) laporan keuangan secara maksimal.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwasanya asas umum tata kelola keuangan daerah yakni:

1. Keuangan daerah sebaiknya digunakan dengan taat, tertib terhadap aturan undang-undang, efektif, ekonomis, efisien, bertanggung jawab dan transparan berdasarkan pertimbangan asas kepatuhan, keadilan, dan manfaat bagi penduduk.
2. Keuangan daerah dikelola dalam pelaksanaan sistematis yang berintegrasi sehingga dihasilkan pada APBD kemudian ditetapkan oleh DPRD di setiap tahunnya.

Seluruh organisasi harus membuat laporan keuangan termasuk pemda. Adanya laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran berkaitan dengan situasi dan hasil kerja keuangan organisasi atau perangkat pemerintahan. Secara mendasar, LKPD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas pengeluaran dana publik. Berdasarkan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menetapkan bahwasanya bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hasil laporan keuangan melalui implementasi SAP dengan basis akrual bertujuan memberikan manfaat lebih besar apabila dilakukan perbandingan beserta tarif yang dikeluarkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut telah selaras dengan tarif yang dikeluarkan sama dan sesuai beserta perolehan manfaatnya.

Kewenangan untuk melaksanakan tata kelola keuangan daerah dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana daerah. Menurut Rini (2012:81), Laporan Keuangan Pemda adalah laporan keuangan yang mencakup data gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satu diantara cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Berdasarkan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah. Bodnar dan Hoopwood (2000:1) menyatakan bahwa «Sistem Informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Pada pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwasanya Walikota/Bupati/Gubernur mengisaratkan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban dalam melaksanakan APBD terhadap DPRD yang dalam bentuk laporan keuangan dan sudah dilakukan pemeriksaan atas BPK dengan paling lambat enam bulan sesudah tahun anggaran selesai.

BPK adalah sebuah lembaga independent yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh lembaga negara. Menurut (Suwanda, 2013) Opini BPK dengan berangsur meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berikut ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2022.

**Tabel 1** Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  
Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2022

<b>TAHUN</b>	<b>OPINI</b>
2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Gianyar

Hasil dari pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Gianyar berhasil mempertahankan opini BPK terhadap LKPD beserta opini WTP, namun menurut (Astana, 2023) mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki beberapa kendala diantaranya aplikasi yang kerap loading, membuat tunjangan kesejahteraan (Tukes) dan honorarium pegawai honor/kontrak mengalami loading, Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Permasalahan yang dihadapi di lapangan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah membuat pegawai mengalami berbagai kendala seperti telatnya pencairan gaji yang berdampak pada kesulitan ekonomi yang dirasakan pegawai, terlebih lagi pegawai honor yang tak sedikit memenuhi kebutuhan hidupnya dari tukes. Permasalahan penggunaan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah yang lambat berdampak pada kinerja pegawai salah satunya pegawai harus menunggu lama untuk melakukan penginputan data sehingga berdampak pada waktu kerja pegawai yang dituntut lembur, hal lain juga berdampak pada menurunnya kualitas kerja pegawai yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada hasil kinerja pemerintah. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan pemda Kabupaten Gianyar. Dengan melihat problematika sebelumnya, peneliti tertarik mengangkat masalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah untuk kemudian peneliti teliti lebih dalam terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah guna melakukan peningkatan mutu laporan keuangan di Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu peneliti merujuk kepada sejumlah penelitian terdahulu yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rujukan ini berfungsi sebagai sumber informasi, panduan, pertimbangan, dan arahan yang membantu penulis dalam tahap penyusunan skripsi. Penelitian sebelumnya telah membantu dalam mengevaluasi pengetahuan yang telah dikembangkan. Penelitian oleh (Aldiansyah, 2022) mendeskripsikan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Kinerja Pelaporan Keuangan BPKAD Kabupaten Magelang. Penelitian oleh (Infantrina, 2021) mendeskripsikan tentang Kesiapan Penggunaan Aplikasi Online Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam laporan pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kota Tasik Malaya. Penelitian oleh (Pamungkas, 2022) mendeskripsikan Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian oleh (Harahap, 2021) mendeskripsikan tentang bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dari beberapa penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan teori DeLone dan McLean dalam (Jogiyanto, 2007) dengan enam elemen kunci yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), intensitas penggunaan (intention to use), kepuasan pengguna (user satisfaction), serta manfaat bersih (benefit).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan masalah yang ditemukan berdasarkan fakta yang sifatnya khusus untuk kemudian meneliti dan menyelesaikan masalah yang sifatnya umum. Lokus penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dengan informan berjumlah 8 orang yang meliputi Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Anggaran PPKD, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Keuangan, Operator BPKAD. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi (Sugiyono, 2016). Bruno (2014:12) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan analisis Triangulasi Data dan Model Miles dan Huberman dalam rangka mengidentifikasi faktor yang mencakup berbagai aspek optimalisasi sistem teknologi informasi terbagi menjadi enam elemen kunci, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*) dari sistem informasi (Jogiyanto, 2007). Data yang dipilih akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data ini akan diolah menjadi kesimpulan dengan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang sebenarnya di lapangan, termasuk aspek waktu dan kondisi yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan sistem informasi dapat ditentukan melalui berbagai aspek, salah satunya adalah melalui model evaluasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini menilai optimalisasi sistem teknologi informasi berdasarkan enam elemen kunci.

### A. Kualitas Sistem

(Jogiyanto, 2007) mendefinisikan kualitas sistem sebagai kinerja sistem yang merujuk pada sejauh mana keandalan dari sistem komputer, waktu respon *on-line* dan kemudahan menggunakan terminal dari sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar di ruang kerja beliau adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar banyak adanya positif dan negatif dalam penggunaannya, dalam hal ini kualitas dari suatu sistem terutama aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia yang ada, aplikasi tersebut merupakan aplikasi satu pintu di seluruh Indonesia, jadi jika kualitas dari sistem sendiri masih belum memadai maka akan mempengaruhi berbagai macam hal”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu terobosan inovasi yang di dalamnya mencakup informasi keuangan di setiap daerah, jika dalam pengelolaan aplikasinya masih belum maksimal maka bisa menjadi suatu permasalahan baru bagi kita karena jika masih belum siap untuk digunakan maka bisa menjadi suatu masalah baru. Seperti contoh baru awal tahun 2024 ini sistem sempat mengalami *error* dimana Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Tabanan yang masuk pada sistem Kabupaten Gianyar, hal ini tentu dapat mengganggu dari pelaporan keuangan itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem sangatlah penting dan bisa disebut sebagai hal yang riskan, karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang mencakup mengenai berbagai informasi pemerintahan.

## B. Kualitas Informasi

Kualitas informasi dapat memiliki efek yang signifikan pada individu. Efek positif yang diharapkan mencakup peningkatan kemampuan memutuskan, menghematkan waktu, dan meningkatkan kualitas kerja yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi (Jogiyanto, 2007).

Menurut (Jogiyanto, 2007), kualitas sangat dipengaruhi oleh delapan hal, yaitu:

1. Kepuasan Pemakai (*user satisfaction*): Kepuasan pemakai terkait informasi yang disediakan sehingga mempengaruhi kualitas informasi yang digunakan
2. Akurasi Informasi (*information accuracy*): Informasi harus bebas dari kesalahan dan jelas dalam maksudnya. Ketidakakuratan bisa terjadi karena gangguan pada sumber informasi atau manipulasi yang merusak atau mengubah data asli.
3. Ketepatan Waktu (*timeliness*): Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus disajikan dengan cepat. Informasi yang terlambat memiliki nilai yang rendah, dan jika digunakan untuk pengambilan keputusan, dapat memiliki dampak yang serius. Karena itu, kecepatan dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi memerlukan teknologi terkini.
4. Keandalan (*reliability*): Menjelaskan bagaimana tingkat keandalan informasi dalam menyajikan suatu informasi guna menciptakan kualitas informasi yang dapat diandalkan.
5. Kelengkapan (*completeness*): Bagaimana tingkat kelengkapan informasi yang disajikan mampu memberikan informasi yang lengkap dan tepat guna.
6. Relevan (*relevancy*): Informasi perlu memberikan manfaat yang relevan bagi pengguna. Tingkat relevansi informasi dapat bervariasi tergantung pada setiap pengguna.
7. Ketepatan (*precision*): Tingkat ketepatan informasi dalam memberikan layanan kualitas informasi yang presisi dan tepat guna.
8. Kekinian (*currency*): Bagaimana informasi yang disajikan dalam layanan informasi yang sesuai dengan keadaan terkini.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Gianyar baru mulai memasuki tahap penatausahaan. Pengelolaan keuangan yang digunakan dalam aplikasi SIPD yaitu tahap perencanaan, penganggaran yang sudah dapat diterapkan dengan baik. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara keseluruhan kami dibantu dengan aplikasi SIMDA-NG yang dapat menghasilkan laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Aplikasi SIPD masih dalam tahapan penatausahaan. Aplikasi SIPD belum sampai pada tahap pelaporan sehingga BPKAD Kabupaten Gianyar memerlukan aplikasi lain untuk pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar, yaitu dengan menggunakan aplikasi *Generation* (SIMDA-NG)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar

Provinsi Bali belum mencapai sasaran dan tujuan dalam tahap pelaporan keuangan. Dengan aplikasi SIPD yang belum dapat digunakan dalam tahap pelaporan keuangan, BPKAD Kabupaten Gianyar masih menggunakan aplikasi lain yaitu SIMDA-NG untuk melakukan tahapan pelaporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SIPD belum efektif sebagai aspek kualitas informasi dan dalam penerapannya untuk mencapai sasaran laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar.

### C. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang sebenarnya mereka terima. Menurut (Jogiyanto, 2007), terdapat lima komponen yang berpengaruh pada kualitas pelayanan yaitu:

1. Berwujud (*tangible*): Seperti misalnya sistem informasi mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Keandalan (*reliability*): Seperti misalnya sistem informasi dapat diandalkan.
3. Kesegaran (*responsiveness*): Seperti misalnya karyawan-karyawan sistem informasi memberikan pelayanan segera kepada pemakai-pemakai.
4. Jaminan (*assurance*): Seperti misalnya karyawan-karyawan sistem informasi mempunyai pengetahuan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
5. Empati (*emphaty*): misalnya sistem informasi mempunyai kepentingan terbaik di hati pemakai.

Di Kabupaten Gianyar sendiri terutama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditinjau dari sisi pelayanan dinilai masih memiliki keterbatasan, berdasarkan tinjauan aspek inilah menjadikan sebagai kelemahan dari sistem pelayanan hal ini dikarenakan tidak semua bisa menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

**Tabel 2.** Jumlah Pengguna Akun di BPKAD Kabupaten Gianyar Tahun 2024

NO (1)	JABATAN (2)	JUMLAH (3)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris Badan	1
3.	Kabid Perencanaan dan Keuangan	1
4.	Kasubbid Pelaporan dan Akuntansi	1
5.	Staf	7

Sumber: Website BPKAD Kabupaten Gianyar, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwasannya user atau admin dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar

berjumlah 11 orang. Dari data tersebut juga dapat disajikan bahwa pengelola layanan dari aplikasi tersebut juga sangat terbatas, namun jenis pelayanan yang diberikan juga harus optimal karena dari pelayananlah berbagai informasi yang disajikan dapat akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa:

“Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sendiri admin ataupun usernya juga sangat terbatas, hal itulah yang masih menjadi bahan evaluasi kami dikarenakan ini mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaan pelayanan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga adanya keterbatasan dikarenakan tidak semua orang mampu menguasai terkait sistem ataupun aplikasi”.

Dalam hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sendiri mampu untuk menghasilkan informasi yang akurat, namun dari segi pelayanan juga dirasa kurang memadai sebab hanya 7 orang admin yang paham dan mampu mengelola semua informasi dan data yang ada di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### **D. Intensitas Pengguna**

Pengukuran intensitas pengguna dapat dilihat dari dua aspek yaitu penggunaan (*actual use*) nyata dan penggunaan dilaporkan (*reported use*) (Jogiyanto, 2007). Intensitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja individu pengguna. Begitu pula, pengaruh individu tersebut berdampak pada kinerja organisasi secara signifikan.

Dalam penggunaan aplikasi SIPD, intensitas penggunaan juga menjadi faktor penting. Selama magang dan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, peneliti juga memperhatikan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat intensif. Terbukti dari proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar menjadi lebih efisien karena informasi dari Organisasi Perangkat Daerah tersedia secara terpusat, memudahkan pengguna untuk melakukan pengecekan secara berkala.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Pengguna aplikasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah hanya terbatas jadi itu merupakan kendala yang dialami di suatu Organisasi Pemerintahan Daerah. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah juga harus sangat teliti dikarenakan tidak semua orang mampu menguasai sistem tersebut”.

Dalam hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan dari aplikasi sudah berjalan maksimal sesuai dengan intensitas waktu karena dalam penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan terlebih untuk melaksanakan pengecekan bertahap, namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi karena seiring berjalannya waktu juga zaman akan terus berkembang, permasalahannya ialah sumber daya manusia yang meng operasikannya masih belum menguasai semua, karena beberapa faktor terutama gagap teknologi.

## **E. Kepuasan Pengguna**

Dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Menurut (Jogiyanto, 2007) untuk mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas, kepuasan pengguna berhubungan erat dengan sikap (*attitude*) yang menjadi salah satu faktor penting. Hal ini karena kepuasan pengguna merupakan faktor pendukung yang memungkinkan administrator dan pengguna sistem dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan mencapai kepuasan yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sudah terhitung berjalan efektif 5 Tahun, Dalam hal ini juga adanya kepuasan dalam mengakses informasi maupun input data yang dibutuhkan jadi dengan demikian ini merupakan faktor yang sangat penting karena mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut”.

Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwasannya pihak pengguna merasa puas terhadap apa yang mereka kelola, dari segi faktor kualitas sistem ataupun informasi juga sangat mempengaruhi untuk membantu penyusunan pelaporan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Gianyar.

## **F. Manfaat Bersih**

Manfaat bersih merujuk pada dampak keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna, baik secara individu maupun organisasi. Manfaat bersih ini mencakup manfaat akses informasi, manfaat kualitas informasi dan manfaat keluwesan informasi. (Jogiyanto, 2007) menyatakan bahwa dampak informasi tidak hanya terbatas pada pengguna individu dan organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok pengguna, antar organisasi, konsumen, pemasok, aspek sosial, dan bahkan negara.

Untuk menjaga kesederhanaan model, (Jogiyanto, 2007) mengusulkan untuk menggabungkan dampak individu dan dampak organisasional menjadi satu variabel tunggal yang disebut manfaat bersih (*net benefits*). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menjaga kesederhanaan model. Dampak sistem informasi tidak hanya terbatas pada pengguna individu dan organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok pengguna, antar organisasi, konsumen, kontraktor, aspek sosial, dan bahkan negara. (Jogiyanto, 2007) mengusulkan untuk menyebutnya sebagai manfaat bersih (*net benefits*).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Teknologi menyatakan bahwa:

“Semenjak adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mampu memberikan manfaat dan menjadikan pekerjaan menjadi efisien, karena melalui aplikasi tersebut mampu menciptakan pelayanan satu pintu lalu terlebih juga mempermudah para pengguna untuk akses data yang diperlukan, dan mempermudah pekerjaan karena fitur yang ada didalamnya mampu meningkatkan kualitas pekerjaan terlebih kualitas laporan keuangan yang ada di Kabupaten Gianyar karena dapat di akses dengan mudah dan transparansi”.

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mampu memberikan manfaat yang banyak terlebih terhadap informasi keuangan daerah dan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Gianyar.

## KESIMPULAN

Hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dapat ditentukan melalui berbagai aspek, salah satunya adalah melalui model evaluasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini menilai optimalisasi sistem teknologi informasi berdasarkan enam elemen kunci, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*) dari sistem informasi

Proses optimalisasi penerapan Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan optimal, hal ini didasarkan pada dimensi yaitu kualitas sistem dan pelayanan yang menyangkut permasalahan *trouble* aplikasi yang terjadi pada pelaksanaan dari SIPD, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola sistem tersebut turut menjadikan penggunaan pelayanan SIPD menjadi kurang optimal.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan untuk penelitian berikutnya terkait penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan pelaporan keuangan agar dapat terlaksana lebih optimal dan lebih baik. Penelitian lebih lanjut juga dapat menganalisis terkait hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya pada masing-masing indikator yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. D. (2022). *Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Kinerja Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Magelang (Metode Penelitian Kualitatif. Teori Pemanfaatan)*.
- Astana, N. (2023). "Aplikasi SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Depdagri, ASN di Gianyar Merana." <https://balitribune.co.id/content/aplikasi-Sistem-Informasi-pemerintahan-Daerah-depdagri-asn-di-gianyar-merana>
- Bodnar George H. And William S, Hoopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*, (Terjemahan Amir Abadi Jusuf dan Tambunan). Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Bruno, L (2014). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9): 1689–99.

- Halim, A., & Muhammad. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai*. UPP STIM YKPN.
- Harahap, M. Z. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Politik Science*.
- Infantrina, C. (2021). *Analisis kesiapan penggunaan aplikasi berbasis online (SIPD) dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kota Tasik Malaya (Metode Penelitian Kualitatif. Teori Analisis)*.
- Jogiyanto. (2007). *Model kesuksesan sistem teknologi informasi*. ANDI.
- Kamaludin; Rini Indriani, (2012). *Manajemen Keuangan "Konsep Dasar dan Penerapannya"* (Revisi; M. Maju, ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Nooraini, A., Mamulak, C., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 2(1), 1–11.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2442>
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Pamungkas, G. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Barat)*.
- Simangunsong, Fernandes, (2016), *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. PPM.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat